

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN CHINA-TAIWAN (1949-2012)

2.1 Sejarah Pemisahan Taiwan

Taiwan pertama kali masuk ke dalam tatanan budaya Cina pada abad keenam belas menjadi satu unit dalam sistem administrasi kekaisaran pada tahun 1689. Sebuah daerah perbatasan yang sulit diatur selama lebih dari satu abad setelahnya, diperintah dengan tangan ringan. Baru pada akhir abad kesembilan belas pemerintah Qing memutuskan untuk memperkuat posisinya di sana, untuk menjaga pulau itu dari tangan tamak negara-negara seperti Prancis dan Jepang. Tetapi ketika Jepang yang sedang bangkit mengalahkan Tiongkok yang sedang terpuruk dalam perang tahun 1894-95, Taiwan menjadi bagian dari rampasan perang, dan menjadi koloni pertama Jepang.²³

Pemerintahan Jepang terkadang keras, tetapi juga membawa ketertiban sipil dan pembangunan ekonomi dan sosial ke pulau itu. Meskipun Taiwan terhindar dari perselisihan internal yang melanda China selama paruh pertama abad kedua puluh Taiwan menjadi sasaran serangan bom Amerika yang berulang selama Perang Dunia II. Menjelang akhir konflik itu Sekutu memutuskan bahwa Taiwan harus dikembalikan ke China kemudian diperintah oleh Kuomintang Chiang Kai-shek dan unit militernya yang mengambil alih pulau itu dari Jepang

²³ Bush, R. C. (2013). *Uncharted strait: The future of China-Taiwan relations*. Brookings Institution Press.

pada tahun 1945.²⁴

Pada masanya ada dua kelompok politik-militer utama dengan ideologi yang berlawanan bersaing untuk membentuk masa depan China modern. Partai Nasionalis KMT muncul sebagai warisan China yang menggantikan Dinasti Qing tetapi akhirnya menyerah pada panglima perang. KMT membayangkan China sebagai republik konstitusional mengikuti model pemerintahan Barat.²⁵ Partai Komunis China PKC yang dibentuk pada tahun 1921 mengupayakan revolusi Komunis bergaya China dan mensosialisika masa depan negara yang menjunjung prinsip-prinsip Marxisme-Leninisme dan akhirnya Maoisme.²⁶

Status Taiwan juga dikenal sebagai Republik China mungkin merupakan masalah geopolitik paling kompleks bagi China. Taiwan didirikan pada tahun 1912 di China dan itu adalah kekuatan yang menggantikan kekuasaan kekaisaran dengan mengakhiri dinasti Qing. Dari tahun itu sampai 1949 itu berbasis di China. Dari tahun 1927 hingga 1937 berhasil menguasai sebagian besar wilayah China di bawah pemerintahan Kuomintang (KMT) yang merupakan partai nasionalis yang menguasai China sebelum Revolusi Komunis. Selama Perang Saudara China (1927-1950) KMT dan pengikutnya berperang melawan komunis China yang dipimpin oleh Mao Zedong. Pada tahun 1949 KMT kehilangan sebagian besar pengaruh teritorialnya dan dievakuasi bersama para pendukungnya ke pulau

²⁴ Nugroho, R. A. (2022). Strategi Peningkatan Keamanan Taiwan Dalam Menghadapi China. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 2(1), 1-11.

²⁵ Wiriaatmadja, R., Dasuki, H. A., & Wildan, D. (2004). *Sejarah dan Peradaban Cina: Analisis Filosofis-Historis dan Sosio-Antropologis*. Humaniora.

²⁶ Kukuh Mahardika, E. (2018). *Hubungan Cina dan Taiwan dalam Puisi Xiangchou 乡愁 Kerinduan Kampung Halaman Sebuah Analisis Semiotika* (Doctoral dissertation, Universitas Darma Persada).

Formosa atau yang dikenal sekarang Taiwan. Di sana didirikan Taipei sebagai ibu kota sementara Taiwan.²⁷

2.2 Dinamika Konflik China-Taiwan Pasca Kemerdekaan

Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945 Amerika Serikat yang mendukung KMT selama negosiasi penyerahan berusaha menengahi gencatan senjata antara KMT dan PKC. Namun ketidak sepakatan PKC-KMT berikutnya dan pelanggaran gencatan senjata mengakibatkan Amerika Serikat mengabaikan upaya mediasi pada 29 Januari 1947 dan penarikan misi Amerika Serikat. Amerika Serikat menanggihkan bantuan militer kepada KMT tetapi melanjutkan program bantuan ekonominya. Pada 1 Oktober 1949 Mao Zedong ketua PKC mengumumkan pendirian Republik Rakyat China sementara Chiang Kai-Shek generalissimo KMT mundur ke Taiwan membawa dua juta tentara KMT dan pendukungnya serta pasukan yang memproklamirkan Taipei sebagai ibu kota sementara Taiwan.²⁸

Pada awal 1950 saat PKC menyelesaikan konsolidasi kekuasaannya atas China mulai mengumpulkan pasukan di seberang Taiwan sementara KMT di Taiwan merencanakan serangan lintas-Selatnya sendiri. Namun setelah Perang Korea pecah pada bulan Juni tahun itu Amerika Serikat mengirimkan Armada Ketujuhnya untuk berpatroli di Selat Taiwan untuk mencegah permusuhan dan

²⁷ Chalaris, M. (2021). Understanding the primary goals of China's defence and security policy. *International Journal of Multidisciplinary Academic Research (ISSN:-2582-8452)*, 2(2), 8-13.

²⁸ Government Portal Of The Republic Of China (Taiwan), History Of Taiwan, daring < https://www.taiwan.gov.tw/content_3.php#:~:text=Taiwan%20is%20declared%20a%20province%20of%20the%20Qing%20Empire.&text=Following%20defeat%20in%20the%20First,rules%20the%20island%20until%201945. > diakses pada 31 May 2022, 01:20 WITA.

ada kerjasama baru antara Amerika Serikat dan KMT. Pada tanggal 2 Desember 1954 Amerika Serikat dan Taiwan menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama di mana Amerika Serikat menjanjikan dukungan untuk Taiwan jika terjadi serangan oleh China. Melalui tindakan Amerika Serikat ini kebuntuan di seberang Selat Taiwan dipadatkan. Permusuhan skala kecil di seberang Selat berlanjut sepanjang tahun 1950-an atas serangkaian pulau (Quemoy (Kinmen) dan Matsu) di lepas pantai Cina.²⁹

Setelah tahun 1949 dan selama sebagian besar Perang Dingin Taiwan menikmati pengakuan internasional yang substansial sebagai Republik China terutama karena kampanye anti-komunis yang dipimpin Amerika Serikat dan sikap isolasionis dan ideologis China sendiri. Namun pada tahun 1971 China mengumpulkan cukup suara di Majelis Umum PBB untuk mengeluarkan Taiwan sebagai Republik China dan mengakui China sebagai perwakilan atas Republik Rakyat China di PBB.³⁰ Pada tahun 1972 dalam perjalanan bersejarah oleh Presiden Amerika Serikat Nixon ke China menjalin kembali kontak dengan China dan menandatangani Komunike Bersama Amerika Serikat-China yang pertama. Dokumen ini yang disebut Komunike Shanghai sebagai membentuk pernyataan tertulis resmi pertama di mana Amerika Serikat dan China mengungkapkan pandangan mereka tentang pertanyaan Taiwan.³¹

²⁹ Mubah, A. S. (2014). Kajian Historis atas Kompleksitas Isu Taiwan dalam Hubungan China dan Amerika Serikat. *Jurnal Global & Strategis*, 8(2).

³⁰ Valentino, R. (2014). *Pengaruh Modernisasi Militer China terhadap Peningkatan Aliansi Jepang dan Amerika Serikat* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

³¹ VOA Indonesia, Majelis Umum PBB Menolak Usaha Taiwan Menjadi Anggota 2006, daring < <https://www.voaindonesia.com/a/a-32-2006-09-13-voa7-85386467/60960.html> > diakses pada 31 May 2022, 22:59 WITA.

Dalam Komunike Shanghai China menegaskan kembali posisinya bahwa pemerintah Republik Rakyat China adalah satu-satunya pemerintah resmi Cina dan Taiwan merupakan provinsi Cina dan pembebasan Taiwan adalah urusan dalam negeri China di mana tidak ada negara lain yang berhak ikut campur. Amerika Serikat mengakui bahwa semua orang China di kedua sisi Selat Taiwan mempertahankan hanya ada satu China dan bahwa Taiwan adalah bagian dari China itu. Selain itu Amerika Serikat menegaskan minatnya dalam penyelesaian damai masalah Taiwan oleh China sendiri.³²

Sepanjang tahun 1970-an semakin banyak negara mengikuti formula membangun hubungan diplomatik formal dengan China dengan mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taiwan tanpa mengakui status kenegaraan. Pada tahun 1979 Amerika Serikat secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan China selama kunjungan ke Washington oleh Presiden China Deng Xiaoping.³³ Komunike 1 Januari 1979 yang menjalin hubungan formal lebih lanjut menguraikan perspektif masing-masing tentang Taiwan dan menetapkan batasan untuk keterlibatan Amerika Serikat dengan Taiwan itu termasuk pembatalan perjanjian pertahanan bilateral serta penarikan pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Taiwan dan penarikan pengakuan diplomatik formal. Tak lama kemudian Kongres Amerika Serikat memberikan garis besar hubungan Amerika Serikat tidak resmi dengan Taiwan dan menegaskan kembali

³² Blazevic, J. J. (2010). The Taiwan Dilemma: China, Japan, and the Strait Dynamic. *Journal of Current Chinese Affairs*, 39(4), 143-173.

³³ Sofianti, I. (2007). *ALASAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MEMPERTAHANKAN STATUS QUO TERHADAP PERSOALAN STATUS POLITIK TAIWAN* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

komitmen Amerika Serikat untuk Taiwan.³⁴

2.3 Periodisasi Pasang Surut Hubungan China-Taiwan

2.3.1 Kebijakan Luar Negeri China Terhadap Taiwan Pada Masa Kepemimpinan Deng Xiaoping (1949-1997)

Semenjak Mao Zedong meninggal pada tahun 1976 dengan Deng Xiaoping menggantikan posisi sebagai pemimpin China selanjutnya.³⁵ Pada sesi pleno ke-3 Komite Sentral Partai Komunis China ke-11 pada akhir tahun 1978 Deng memperkenalkan inisiatif kebijakan China baru yang disebut Reformasi dan Pembukaan. Hampir bersamaan Deng menormalkan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat pada Januari 1979 dan Amerika Serikat membubarkan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kebijakan Reformasi dan Pembukaan mengharuskan China untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Taiwan dan dengan dibubarkannya perjanjian pertahanan timbal balik Amerika Serikat dengan Taiwan dan China dihadapkan pada kebutuhan dan potensi untuk merumuskan kebijakan terhadap Taiwan yang baru.³⁶

Hasil dari proses perumusan kebijakan baru ini adalah Penyatuan Damai dan *One Country, Two System* Selama era Mao Taiwan dilihat oleh Partai Komunis China hanya sebagai target untuk Pembebasan sebaliknya Penyatuan Damai tampaknya menyarankan pendekatan yang lebih stabil dalam hubungan

³⁴ VOI Indonesia, AS mengakui pemerintah China Komunis dalam Sejarah ini 15 Desember 1978, daring < <https://voi.id/memori/114214/as-mengakui-pemerintahan-china-komunis-dalam-sejarah-hari-ini-15-desember-1978> > diakses pada 31 May 2022, 22:10 WITA.

³⁵ Pradana, M. E. (2022). Politik Luar Negeri Tiongkok Sejak Tahun 1978: Transisi, Rebalancing dan Aktivisme. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2(1), 1-14.

³⁶ Friedman, E. (2007). China's Changing Taiwan Policy. *American Journal of Chinese Studies*, 14(2), 119-134. <http://www.jstor.org/stable/44288853>.

China-taiwan untuk penyatuan. Pada tanggal 1 Januari 1979 Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional merilis Pesan kepada Rekan senegaranya di Taiwan yang menyerukan Taiwan untuk terlibat dalam pembicaraan untuk mengakhiri keberadaan militer dan juga berjanji untuk menghentikan meriam yang diarahkan ke Pulau Jinmen. Pernyataan kebijakan yang lebih jelas dan lebih sistematis dibuat pada tanggal 30 September 1981 oleh Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Ye Jianying yang mengajukan proposal sembilan poin untuk Penyelesaian Damai dan *One Country, Two System*. Yang sangat penting adalah usulan-usulan (1) untuk menggunakan Front Persatuan ketiga untuk mencari penyatuan kembali tanah air, (2) untuk memfasilitasi pertukaran surat, perdagangan, layanan udara dan pengiriman serta pertukaran akademik, budaya, olahraga dan seni, dan (3) untuk memungkinkan Taiwan menikmati otonomi tingkat tinggi sebagai Daerah Administratif Khusus dan mempertahankan angkatan bersenjataanya memelihara hubungan ekonomi dan budayanya dengan negara lain.³⁷

Dalam penerapannya mengenai penyatuan damai dan kebijakan *One Country, Two System* Deng memasukkan sejumlah elemen penting: (1) Sebagai Daerah Administratif Khusus Taiwan dapat mempertahankan kemerdekaannya sendiri dan mengadopsi sistem yang berbeda dari yang ada di China. (2) Sistem hukumnya akan independen dan tidak diharuskan untuk merujuk masalah ke Beijing untuk keputusan akhir apa pun. (3) Taiwan dapat memiliki militernya sendiri selama tidak menimbulkan ancaman bagi China. (4) Pemerintah China

³⁷ A Policy of “one country, two system” on Taiwan, Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China (daring) 200, < https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/200011/t20001117_697847.html > diakses pada 19 April 2022, 02:00 WITA.

tidak akan menempatkan personel di Taiwan. (5) Taiwan akan mengelola sistem politik, pemerintahan, militer, dan sistem lainnya sendiri. (6) Beijing akan memasukkan anggota dari Taiwan ke dalam kepemimpinan pusatnya. Deng Xioping memiliki keyakinan yang cukup besar dalam mencapai penyatuan damai dengan Taiwan.³⁸ Pidato Deng Xioping pada 16 Januari 1980 menyampaikan tiga misi yang harus diselesaikan selama tahun 1980-an dan kembalinya Taiwan menjadi satu dengan China adalah salah satu misi yang harus terlaksana. Sebagai bagian dari upaya menuju Penyatuan Damai perusahaan Taiwan akan diberikan prioritas dalam perdagangan dan investasi dengan China langkah-langkah diadopsi untuk memberikan perlakuan istimewa dalam perdagangan dan investasi dan pertukaran dilembagakan antara kelompok China dan Kumintang Taiwan serta organisasi swasta.

Kebijakan Deng Xioping mengenai Taiwan dengan Penyatuan Damai dan inisiatif *One Country, Two System* mewakili perubahan besar dari era Mao Zedong dan terus berlanjut hingga masa kepemimpinan Deng Xioping sebagai dasar kebijakan China terhadap Taiwan. Namun peimplementasian kebijakan mengenai penyatuan tidak sesuai yang diharapkan Deng dalam mencapai solusi awal. Salah satu penyebabnya adalah tanggapan negatif dari kepemimpinan Taiwan dan penyebab lainnya adalah bahwa keterlibatan Amerika Serikat dengan Taiwan jauh lebih dalam daripada yang diantisipasi Deng. Presiden Taiwan Chiang Ching-kuo mengadopsi kebijakan “Tiga Noes” (tidak ada kompromi, tidak

³⁸ BAB III Kebijakan Administrasi One Country Two System Di Negara Tiongkok (daring), < <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22250/M.%20Iqbal%2020130510512%20BAB%203%20A5.pdf?sequence=4&isAllowed=y> > diakses pada 19 April 2022, 22:00 WITA.

ada kontak, dan tidak ada negosiasi) dan tetap bersikap negatif terhadap dialog dengan China hingga tahun 1987. Adapun hambatan lain mengenai Undang-Undang Hubungan Taiwan yang diadopsi oleh Amerika Serikat pada tahun 1979 mengizinkan ekspor senjata lanjutan ke Taiwan.³⁹

2.3.2 Kebijakan Luar Negeri China Terhadap Taiwan Pada Masa Kepemimpinan Jiang Zemin (1995-2002)

2.3.2.1 Krisis Selat Taiwan Ketiga

Ketika Jiang Zemin mengambil posisi sekretaris jenderal Partai komunis China setelah gangguan Tiananmen tahun 1989 ia pada awalnya mempertahankan kebijakan Deng Xiaoping terhadap Taiwan dan berusaha untuk mengurangi ketegangan hubungan antara Taiwan dan daratan dan untuk mempromosikan penyatuan Damai. Pada tahun 1987 Taiwan telah mengambil langkah mundur dari penolakannya yang lama untuk terlibat dalam dialog dan mulai menunjukkan kesediaan untuk berbicara dengan China dan pada tahun 1991 melihat pembentukan dua kelompok tingkat kerja semi-resmi Taiwan's Straits Exchange Foundation (SEF) dan Asosiasi China untuk Hubungan Lintas Selat Taiwan (ARATS) pada tahun berikutnya kedua belah pihak mencapai Konsensus 1992 sebagai dasar untuk melakukan dialog pemerintah.⁴⁰ Bagi pihak China ini merupakan kesepakatan bahwa China dan Taiwan termasuk dalam "One China" yang sama sementara Taiwan menafsirkan bahwa kedua belah pihak telah menyetujui Satu China Diekspresikan Secara Berbeda dengan kata lain bahwa

³⁹ Zheng, L. (2001). MAO Zhe-dong's Thoughts of "Liberating Taiwan Peacefully" with DENG Xiao-ping's Conception of "One Country and Two System. *Journal of Anshan Institute of Iron and Steel Technology*.

⁴⁰ Bo, Z. (2002). Guest Editor's Introduction. *Chinese Law & Government*, 35, 17 - 3.

Taiwan dan China masing-masing akan menjelaskan sendiri dalam istilah One China. Hasilnya adalah konsensus yang sangat ambigu yang tidak memperjelas perbedaan antara kedua belah pihak. Wang Daohan ketua ARATS dan Koo Chen-fu ketua SEF dapat bertemu untuk berdiskusi pada April 1993 di Singapura.⁴¹

Pada Januari 1995 Jiang Zemin merilis proposal delapan poin untuk mengklarifikasi posisi pemerintahnya terhadap Taiwan. Delapan poinnya adalah: (1) pemeliharaan dari satu prinsip China; (2) penerimaan pengembangan hubungan ekonomi dan budaya nonpemerintah Taiwan dengan negara-negara lain tetapi oposisi terhadap kegiatan apa pun yang berusaha membangun "*Two China*" atau "*One Cina, One Taiwan*"; (3) kemajuan di kedua sisi selat menuju reunifikasi yang damai; (4) upaya untuk mencapai reunifikasi yang damai dan penolakan terhadap kekuatan senjata antara semua rekan senegarannya China (orang-orang di China dan orang-orang Taiwan sama); (5) sangat meningkatkan pertukaran ekonomi dan kerja sama di kedua sisi selat; (6) memelihara dan menghidupkan budaya China; (7) perlindungan hak-hak dan kepentingan sah dari rekan senegarannya di Taiwan; dan (8) pertukaran kunjungan oleh kepemimpinan di kedua sisi.⁴² Secara keseluruhan proposal ini dipandang menawarkan pendekatan yang lebih moderat.

Mulainya hubungan China-Taiwan memburuk ketika masalah muncul mengenai visa bagi Presiden Taiwan Lee Teng-Hui untuk mengunjungi Amerika

⁴¹ Wong, J., & Nian, Z. (2002). China's Post-Jiang Leadership Succession: Problems and Perspectives.

⁴² The 8-Point Proposition Made by President Jiang Zemin on China's Reunification, Embassy of People's Republic of China in the United States of America (daring) 2013, < <https://www.mfa.gov.cn/ce/ceus/eng/zt/twwt/t36736.htm> > diakses pada 19 April 2022, 19:21 WITA.

Serikat memunculkan krisis Selat Taiwan ketiga dari 1995 hingga 1996. Lee berusaha mengunjungi Amerika Serikat di Undangan Universitas Almamater Cornell-nya dan pemerintahan Clinton menyerah pada tekanan kongres dan menyetujui visa. Reaksi China tiba-tiba mengeraskan sikapnya terhadap Taiwan sehingga kunjungan Presiden Lee ke Amerika Serikat disertai dengan latihan Angkatan Laut dan Angkatan Udara PLA dan menguji cincin FI rudal DF-15. Pada tahun 1996 pada saat pemilihan presiden di Taiwan China secara bersamaan meningkatkan tekanannya pada Taiwan dengan melakukan latihan militer skala besar termasuk peluncuran rudal dan latihan pendaratan amfibi.⁴³

China sangat mengeraskan posisinya karena kesadaran yang semakin besar di daratan itulah Taiwan membuat kemajuan menuju kemerdekaan yang efektif dan pengakuan internasional. Pertama demokratisasi menunjukkan prospek kemajuan di Taiwan. Ketika Taiwan menjadi lebih taiwaned dan demokratisasi menyebar China menganggap bahwa Taiwan telah berhenti berjuang untuk memosisikan dirinya sebagai pemerintahan yang sah dari semua China dan sebaliknya bertujuan untuk kemerdekaan Taiwan. Kedua China menyadari bahwa Amerika Serikat dan negara-negara Barat memandang bahwasanya China sebagai musuh dan berusaha menggunakan Taiwan untuk menahan China dan mencoba menyebarkan pandangan ini ke negara-negara lain. Mengikuti Tiananmen Square dan transformasi selanjutnya dalam sistem komunis dari sejumlah negara Eropa Timur serta runtuhnya Uni Soviet dan China menyadari bahwa sebagai salah satu dari sedikit negara dengan menganut system ideologi komunis. Tidak secara

⁴³ Tien, H. (1996). Taiwan in 1995: Electoral Politics and Cross-Strait Relations. *Asian Survey*, 36, 33-40.

langsung namun China beranggapan bahwa Amerika Serikat memandang China sebagai musuh berikutnya dan Amerika Serikat berusaha menggunakan Taiwan untuk menahan kebangkitan China.⁴⁴ Pada September 1992 Pemerintahan George H. W. Bush memutuskan untuk menanggapi pembelian SU China dari SU China-27 pesawat *fighter* dengan mengekspor ke Taiwan sekitar 150 f-16a/b *fighters*. Pemerintahan Clinton berikut mengumumkan peninjauan kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan pada September 1994 dan meningkatkan tingkat pertukaran dengan Taiwan. Perkembangan seperti itu tidak diragukan lagi tampak bagi China sebagai perubahan nyata dan besar dalam kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya China mulai melakukan tes rudal di Selat Taiwan pada 1995 dan melakukan latihan militer skala besar pada awal 1996 menjelang pemilihan presiden Taiwan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menunjukkan tekad China terhadap Amerika Serikat dan menghentikan intervensinya di Taiwan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang niat Amerika Serikat serta memberikan peringatan terhadap meningkatnya kemerdekaan di Taiwan dan meningkatkan pemilihan yang akan datang. Sejak saat ini Reaksi Amerika Serikat terhadap tes rudal 1995 terkendali Jiang Zemin menilai bahwa Amerika Serikat tidak akan melakukan intervensi atau melakukannya hanya pada tingkat simbolis dan karenanya meluncurkan latihan skala besar tahun 1996. Amerika Serikat melakukan pengiriman dua operator Kelompok-kelompok pertempuran ke Selat Taiwan yang dipimpin oleh Operator

⁴⁴ Qimao, C. (2003). China's New Approaches to a Peaceful Solution of the Taiwan Issue. *American Foreign Policy Interests*, 25, 513 - 525.

USS Independence dan USS Nimitz sehingga tidak mungkin bagi China untuk menerapkan tekanan militer yang lebih besar ke Taiwan.⁴⁵

2.3.2.2 Pengaruh Krisis Ketiga

Krisis Selat Taiwan Ketiga ini jelas memiliki peningkatan yang kuat pada ruang lingkup keamanan Asia Timur. Dari sudut pandang China krisis di Selat Taiwan ini adalah kesempatan untuk membuat tekad China yang jelas terhadap Taiwan. Pesan yang disampaikan kepada Taiwan dan Amerika Serikat adalah bahwa kepada China masalah Taiwan adalah masalah penting dari kepentingan nasional dan legitimasi pemerintahannya dan dapat mengakibatkan penggunaan kekuatan. Kemudian hubungan Amerika Serikat dan China mengalami peningkatan dari 1997 hingga 1998 dan pada Juni 1998 Presiden Clinton mengunjungi Shanghai dan di sana menyatakan *tiga no noes* sendiri: Amerika Serikat tidak akan mendukung kemerdekaan untuk Taiwan itu tidak akan mendukung satu China satu Taiwan Taiwan atau dua China dan itu tidak akan mendukung keanggotaan Taiwan di PBB atau organisasi internasional yang mengharuskan anggotanya menjadi negara bangsa.

Sementara China mencapai beberapa langkah dalam kemenangan diplomatik tapi secara militer situasinya menjadi jauh lebih intens untuk China karena Amerika Serikat harus mengirim dua kelompok militer pembawa menjadi jelas bahwa China telah memilih dengan tidak ada tindakan militer yang bisa ditanggapi dengan meninggalkan China dengan sedikit kemungkinan reaksi. Beberapa orang China percaya bahwa jika situasi yang sama muncul di masa

⁴⁵ Fu, Z. (1996). CHINA'S PERCEPTION OF THE TAIWAN ISSUE. *UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs*, 1(2), 321–350. <http://www.jstor.org/stable/45302054>

depan dan China tidak dapat menanggapi intervensi Amerika Serikat dalam beberapa kasus ini dapat berakhir berarti penerimaan kemerdekaan Taiwan. Dengan berakhirnya Perang Dingin China mengakui kebutuhan untuk memodernisasi militernya. Strategi militer China telah dipengaruhi oleh reformasi militer yang ditampilkan Amerika Serikat selama Perang Teluk 1991 dan pada tahun 1993 ia mengembangkan strategi militer baru untuk menangani perang regional di lingkungan teknologi tinggi. Jiang Zemin kemudian menekankan bahwa jika sebuah insiden besar akan terjadi yang dapat mempromosikan kemerdekaan Taiwan mungkin perlu untuk merespons dengan perang berteknologi tinggi regional.⁴⁶

Krisis Selat Taiwan mendorong modernisasi militer China Pada bulan Desember 1995 sesi pleno yang diperluas dari Komisi Militer Pusat mengadopsi daftar hal-hal terpenting yang diinginkan Komisi Militer Pusat termasuk dalam rencana lima tahun kesembilan China (1996-2000) sebagai cara untuk membangun militer. Elemen-elemen ini termasuk penekanan bahwa rencana lima tahun kesembilan harus mencari kemajuan besar dalam teknologi militer dan lebih lanjut bahwa rencana itu diharapkan untuk mencapai dua transisi penting yaitu dalam mempromosikan kesiapan secara militer keseluruhan transisi dari persiapan militer untuk regional konvensional atau konvensional Perang menuju persiapan untuk perang regional berteknologi tinggi dan pergeseran penekanan dalam membangun militer dari kuantitas ke kualitas dan dari pengembangan yang intensif-kepanikan ke teknologi.

⁴⁶ Prayogi, I. G. C. UPAYA REUNIFIKASI TAIWAN DITINJAU DARI PERKEMBANGAN KONFLIK SELAT TAIWAN PERIODE 1981.

Berbicara tentang unsur-unsur penting ini Jenderal Zhang Zhen wakil ketua Komisi Militer Pusat menekankan bahwa ketika Taiwan melakukan kegiatan yang ditujukan untuk kemerdekaan China akan meningkatkan penggunaan militer (Assassin's Mace Shashoujian). Jenderal Zhang Wannian kepada wakil ketua Komisi Militer Pusat menekankan pentingnya teknologi baru untuk militer menunjukkan efektivitas serangan presisi dan konflik elektronik dan mencatat bahwa Peran teknologi dalam meningkatkan kapasitas pertempuran lebih besar hari ini daripada sebelumnya. Ia juga mencatat pemahaman bahwa peperangan regional dalam kondisi saat ini semakin menjadi kontes kemampuan teknologi dan bahwa sisi yang memiliki keunggulan teknologi dapat mendominasi didalam konflik.⁴⁷

Sejak publikasi Komisi Militer Pusat mengenai moderernisasi militer China telah mencoba meningkatkan kekuatan militer untuk mendapatkan kemampuan seperti serangan presisi yang dapat mengeksploitasi titik-titik lemah Amerika Serikat sehingga menghalangi intervensi di Taiwan. Kemampuan China pada kemampuan serangan asimetris yang telah menarik perhatian sejak paruh kedua tahun 2000 adalah hasil dari investasi yang dilakukan sejak periode itu. Hubungan China-Taiwan setelah krisis Selat Taiwan ketiga mengharuskan China untuk mempertahankan perhatian erat. Pada tahun 1999 Presiden taiwan Lee Deng-Hui menyebut hubungan di seluruh Selat Taiwan sebagai hubungan negara ke negara khusus yang ditafsirkan China sebagai langkah lain menuju kemerdekaan Taiwan. Selain itu pemilihan presiden 2000 dimenangkan oleh Chen

⁴⁷ Scobell, A. (2000). Show of Force: Chinese Soldiers, Statesmen, and the 1995-1996 Taiwan Strait Crisis. *Political Science Quarterly*, 115(2), 227-246.

Shui-Bian dari Partai Progresif Demokrat yang bersandar kuat ke arah kemerdekaan Taiwan. Bagi China ini merupakan ditawarkan tantangan baru bagi China melalui langkah lebih lanjut menuju kemerdekaan.

Pada bulan Februari 2000 pada puncak kampanye presiden Kantor Urusan Taiwan Dewan Negara China mengeluarkan buku putih berjudul *The One China Principle and Taiwan Issue* untuk menekankan mengenai posisi China. Buku putih ini mencantumkan tiga situasi ketika kekuatan dapat digunakan: (1) ketika Taiwan telah memotong dirinya sendiri dari China terlepas dari nama apa yang digunakan; (2) ketika Taiwan telah ditempati oleh kekuatan asing; atau (3) ketika otoritas Taiwan telah menunda negosiasi untuk resolusi damai dari penyatuan sampai beberapa poin yang tidak ditentukan di masa depan. Poin ketiga khususnya adalah inklusi baru dan tampaknya telah ditujukan untuk menahan Chen Shui-Bian China juga mendefinisikan kembali makna satu China. Pada bulan Agustus 2000 Wakil Perdana Menteri Qian Qichen memberikan definisi baru yang direvisi dengan menyatakan hanya ada satu China di dunia China dan Taiwan keduanya adalah bagian dari China, Dan kedaulatan dan integritas teritorial China tidak dapat dipisahkan. Di masa lalu Cina bersikeras bahwa di bawah satu prinsip China satu-satunya pemerintahan yang sah adalah dari Republik Rakyat China. Dengan meningkatnya demokratisasi dan orientasi Taiwan menjadi kurang tertarik untuk memperebutkan gelar pemerintah Tiongkok yang sah. Kembalinya prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat sebagai fokus baru

pada situasi yang berubah yang akan memblokir pemisahan Taiwan dari daratan terlepas dari bentuk spesifik.⁴⁸

2.3.3 Kebijakan Luar Negeri China Terhadap Taiwan Pada Masa Kepemimpinan Hu Jintao (2003-2013)

2.3.3.1 *Anti-Secession Law*

Dengan posisi sekretaris jenderal Partai Komunis China pada tahun 2002 dan kepemimpinan CMC pada tahun 2004 Hu Jintao menjadi pemimpin China baik dalam nama maupun dalam kenyataan. Dia berusaha menerapkan pendekatan terhadap masalah Taiwan yang berbeda dari garis keras yang konsisten dari pendahulunya Jiang Zemin. Hu Jintao mencari pendekatan yang efektif dengan menerapkan sikap pendekata keras maupun pendekatan lunak terhadap Taiwan. Dengan kata lain Hu pindah dari desakan masa lalu pada penyatuan langsung dan total. Sementara ia masih akan menggunakan pendekatan keras yang mengancam penggunaan kekuatan untuk mencegah Taiwan mencari kemerdekaan yang terpisah di bawah tingkat itu ia memperkenalkan pendekatan yang lebih lembut untuk mempromosikan dialog dan pertukaran. Pada 17 Mei 2004 Kantor Urusan Dewan Negara Taiwan mengumumkan bahwa jika Taiwan mengakui satu prinsip China dan menghentikan kegiatan separatis, dialog, dan pertukaran dapat dilanjutkan dan kerja sama ekonomi juga dapat ditingkatkan untuk menunjukkan pergeseran ke kebijakan yang lebih lembut seperti itu terhadap Taiwan.⁴⁹

⁴⁸ Montaperto, R.N., Przystup, J.J., & Faber, G.W. (2000). "One China" and Relations across the Taiwan Strait.

⁴⁹ Zhao, S. (2006). Conflict prevention across the Taiwan Strait and the making of China's anti-secession law. *Asian Perspective*, 30(1), 79-94.

Pertama untuk menghentikan setiap gerakan menuju pemisahan diri di pihak Taiwan. Pemerintahan Hu Jintao mengusulkan undang-undang anti-pemisahan yang disahkan pada 14 Maret 2005 pada konferensi ketiga Komite Tetap China ke-10. Profesor Yasuhiro Matsuda menunjukkan bahwa undang-undang ini mencerminkan pergeseran kebijakan dari promosi penyatuan hingga pencegahan kemerdekaan. Dengan kata lain (1) penekanan ditempatkan pada mempertahankan status quo, (2) tidak ada tekanan yang ditempatkan pada satu negara atau dua konsep sistem, (3) undang-undang tersebut menawarkan pendekatan garis keras dan garis lunak, dan (4) Batas ketat ditempatkan pada resor ke tindakan yang tidak damai. Matsuda juga melihat pemeliharaan ambiguitas strategis dalam penerapan hukum sebagai salah satu karakteristik yang menonjol.⁵⁰

Mengacu pada kondisi di mana tindakan non-perdamaian dapat diterapkan undang-undang anti-pemisahan mengutip tiga kondisi: (1) Ketika Taiwan telah berpisah dari China, (2) ketika perubahan besar telah terjadi yang mengancam untuk memisahkan Taiwan dari China, dan (3) ketika semua kemungkinan penyatuan secara damai telah menghilang. Mengenai undang-undang tersebut Wu Bimbuo Ketua Komite Tetap China menjelaskan bahwa itu sepenuhnya sesuai dengan kebijakan penting seperti penyatuan damai dan *One Country, Two System* yang ditetapkan oleh otoritas pusat dan bahwa itu dirancang sebagai undang-undang untuk menentang dan menekan kegiatan untuk membagi negara dengan

⁵⁰ Boon, H.T. (2014). CrossStrait Relations since 2008: Assessing Intraposition Politics. *International Journal of China Studies*, 5, 137.

separatis Taiwan.⁵¹

2.3.3.2 Penolakan China Terhadap Keanggotaan PBB Taiwan

Pada saat pelantikannya Chen Shui-bian mengindikasikan dia akan mengikuti garis moderat dalam memimpin Taiwan. China tidak menanggapi isyarat menuju rekonsiliasi ini China melakukan sikap menunggu dan melihat lalu melanjutkan tekanan diplomatiknya. Pada Maret 2004 Chen mendekat dan menargetkan pemilihannya kembali ia meninggalkan garis moderatnya dan mengambil sikap yang lebih radikal. Pada bulan Agustus 2002 ia mengumumkan posisi bahwa ada negara terpisah di setiap sisi Selat Taiwan. Pada bulan September 2003 ia lebih lanjut menyerukan adopsi populer pemilih Taiwan dari konstitusi baru dan reorientasi fokusnya pada apakah Taiwan harus memperkuat pertahanan nasionalnya atau tidak.

Sebagai reaksi terhadap radikalisasi ini oleh Chen Shui-bian yang merupakan seorang pemimpin dari Partai Progresif Demokrat pemerintah Hu Jintao berusaha untuk mengisolasi Chen melalui hubungan dengan Partai Kuomintang dan Amerika Serikat Ini memperluas hubungan antara Partai Komunis China dan Kumintang. Pada bulan Maret 2005 Wakil Ketua Kumintang Chiang Pin-kung melakukan kunjungan ke China dan pertemuan dengan Chen Yunlin direktur Kantor Urusan Taiwan Komite Pusat Partai Komunis China. Diikuti dengan kunjungan April 2005 ke China oleh Ketua Kumintang Lien Chan ia mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Hu Jintao dan keduanya menghasilkan pernyataan bersama yang sangat mendukung konsensus 1992 serta

⁵¹ Wei, C. N. (2010). China's Anti-Secession Law and Hu Jintao's Taiwan Policy. *Yale J. Int'l Aff.*, 5, 112.

menentang kemerdekaan Taiwan dan membuka kembali negosiasi dan pertukaran lintas selat di antara topik-topik lain yang menjadi perhatian bersama. Melalui pendalaman kontak dengan Kumintang China mampu menarik kelompok-kelompok domestik Taiwan yang menginginkan stabilisasi hubungan China-Taiwan dan memperdalam pertukaran yang berpusat pada urusan ekonomi pada saat yang sama menunjukkan kepada mereka bahwa penentangan mereka terhadap kemerdekaan adalah posisi yang menguntungkan.⁵²

Koordinasi seperti itu antara China dan Amerika Serikat membantu mencapai tujuan menahan upaya di Taiwan untuk mengubah status quo. China telah memberi tahu Amerika Serikat melalui berbagai rute tentang isi Undang-Undang Anti-Pemisahan. Sementara Amerika Serikat tidak dapat mencegah adopsi undang-undang itu melalui diskusi yang cermat Amerika Serikat dipuji karena telah mencapai sejumlah perubahan untuk melunakkan bahasa rancangan seperti menghilangkan referensi ke *One Country, Two System*. Selama pertemuannya dengan Presiden Bush pada November 2005 Ketua Hu Jintao menyetujui bahwa Amerika Serikat dan China memiliki kepentingan strategis yang sama dalam menentang dan mencegah kemerdekaan Taiwan dan menjaga stabilitas damai Selat Taiwan.

Selanjutnya sementara pemerintahan kedua Chen Shui-bian pada awalnya mencari jalan yang lebih moderat menjelang akhir masa pemerintahan sekali lagi kembali ke jalan menuju kemerdekaan. Pada Mei 2007 Presiden Chen menunjukkan niat untuk mencari keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa

⁵² Chang, W. U., & Chao, C. M. (2009). Managing Stability in the Taiwan Strait: Non-Military Policy towards Taiwan under Hu Jintao. *Journal of Current Chinese Affairs*, 38(3), 98-118.

dengan nama Taiwan dan kemudian mengumumkan bahwa kebijakan akan diadakan untuk pertanyaan itu. Namun sebagai akibat dari oposisi Amerika Serikat yang jelas pemilih tidak memberikan jumlah surat suara sah yang diperlukan.⁵³ Jelas ini mendapat penolakan terhadap China dan membuat hubungan keduanya memburuk.

2.3.3.3 *Peaceful Development* Di Kedua Sisi Selat

Kemunculan pemerintahan Kumintang Ma Ying-jeou dilihat dari sudut pandang China berarti keberhasilan menggagalkan upaya pemerintahan Chen Shui-bian menuju kemerdekaan Taiwan. Pemerintah Hu Jintao menyambut baik perubahan haluan pemerintah Ma Ying-jeou menuju hubungan yang lebih dekat dengan China. Hu Jintao mengidentifikasi pembangunan damai melintasi selat berdasarkan pada stabilisasi hubungan sebagai langkah selanjutnya dalam hubungan lintas selat. Pembangunan damai di seberang selat diusulkan selama pembicaraan 2005 antara Hu dan Lien Chan dan secara aktif dipromosikan ketika pemerintahan Kumintang berkuasa. Pada NPC ke-17 tahun 2007 Hu menyusun mengenai hubungan lintas selat untuk masa depan dan menyerukan konsultasi untuk secara resmi meletakkan sikap permusuhan di seberang selat berdasarkan prinsip *One China* kesimpulan dari perjanjian damai dan penciptaan kerangka kerja. untuk pembangunan damai di kedua sisi selat. Dorongan dasar dari peta jalan ini adalah ekonomi dulu, politik kemudian dan kerjakan yang mudah dulu dan tinggalkan yang sulit untuk nanti menetapkan untuk bekerja dulu untuk

⁵³ Kirana, D. N. (2007). *UPAYA-UPAYA PEMERINTAHAN CHEN SHUI BIAN DALAM MENGHAMBAT CINA MEREINTEGRASIKAN TAIWAN (MARET 2000-MARET 2004)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

mencapai yang dapat dicapai dan secara bertahap membangun hasil akumulasi untuk membuka jalan menuju penyatuan.⁵⁴

Untuk mewujudkan visi ini dalam pidatonya pada tanggal 31 Desember 2008 pada peringatan 30 tahun dikeluarkannya Pesan untuk Rekan-Rekan di Taiwan Presiden Hu memaparkan kebijakannya untuk pembangunan damai di kedua sisi Selat Taiwan. Untuk mewujudkan penyatuan damai China-Taiwan pertama-tama perlu memastikan pembangunan damai di kedua sisi selat. Untuk tujuan itu Hu mengeluarkan enam kebijakan: (1) dukungan kuat untuk Satu China dan promosi rasa saling percaya; (2) promosi kerjasama ekonomi dan pembangunan bersama; (3) promosi budaya Tionghoa; (4) perluasan pertukaran manusia; (5) konsultasi tentang urusan eksternal (termasuk beberapa pelonggaran pembatasan partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional); dan (6) terlibat dalam konsultasi damai untuk mengakhiri hubungan permusuhan.⁵⁵

Perubahan tersebut di kedua belah pihak membawa perubahan ke arah perbaikan dalam hubungan China-Taiwan, dan pada bulan Juni 2008 kepemimpinan ARATS dan SEF bertemu lagi untuk pembicaraan. Hubungan China-Taiwan semakin dalam sejak saat itu terutama dalam hal kerja sama ekonomi. Pembicaraan antara para pemimpin tingkat kerja atas dari kedua belah pihak diadakan delapan kali di bawah pemerintahan Hu Jintao dengan penandatanganan 18 perjanjian kerja sama di bidang ekonomi dan bidang lainnya termasuk penghapusan larangan pariwisata daratan ke Taiwan dan pengiriman dan

⁵⁴ Chen, C. K. (2012). Comparing Jiang Zemin's Impatience with Hu Jintao's Patience Regarding the Taiwan Issue, 1989–2012. *Journal of Contemporary China*, 21(78), 955-972.

⁵⁵ Tamara, T. D. (2020). Politik Luar Negeri Taiwan Terhadap China Di Bawah Kepemimpinan Ma Ying Jeou (2008-2012). *Indonesian Journal of Global Discourse*, 2(1), 14-26.

komunikasi. Pada Juni 2010 kedua belah pihak menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Sama Ekonomi (ECFA) termasuk penghapusan bea masuk secara bertahap pada 539 barang yang diekspor dari daratan dan 267 dari Taiwan.⁵⁶

Kebijakan terhadap Taiwan selama tahun-tahun Hu Jintao tampak agak berhasil karena menghalangi kemerdekaan Taiwan dan mencapai stabilitas di Selat Taiwan dalam bentuk yang menguntungkan China. Namun sebagian besar tidak berhasil menggerakkan dialog politik ke arah penyatuan. Sementara China dan Taiwan memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya stabilitas dan perdamaian di kedua sisi selat mempertahankan status quo tidak pernah lebih dari batas minimum yang dapat diterima China dan status quo diperlukan untuk menggerakkan pihak-pihak ke jalan menuju penyatuan. Para pemimpin dari kedua belah pihak melakukan dialog politik berulang kali meskipun tidak ada kemajuan besar ke arah yang diinginkan.

Dengan menciptakan mekanisme untuk membangun rasa saling percaya dalam urusan militer pertama kali secara resmi dibahas dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan 17 Mei 2004 oleh Kelompok Kerja Komite Pusat Partai Komunis China untuk Urusan Taiwan dan Kantor Urusan Taiwan dari Dewan Negara Republic China. Kemudian Hu Jintao juga mengangkat topik tentang mekanisme saling percaya keamanan militer dalam pidato tahun 2008. Namun bagi China mekanisme kepercayaan militer adalah sesuatu yang harus muncul dari kepercayaan politik timbal balik di mana kesepakatan tentang prinsip politik dasar

⁵⁶ Wahyuningsih, E. *Perubahan Kebijakan Luar Negeri Taiwan Melalui Kerja Sama Ekonomi Dengan China Dalam Kesepakatan Ecfa Periode 2010-2014* (Bachelor's thesis, Fisip UIN Jakarta).

sangat penting. Latihan bersama tentang penyelamatan maritim diadakan tiga kali pada 2010, 2012, dan 2014 dan ada juga kasus kerja sama tingkat sub-nasional non-militer lainnya tetapi tidak ada kemajuan lain selain beberapa contoh tersebut.⁵⁷⁵⁸

⁵⁷ Cabestan, J. P. (2009). China's foreign-and security-policy decision-making processes under Hu Jintao. *Journal of Current Chinese Affairs*, 38(3), 63-97.